



BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif # melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKjIP)

TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 yang merupakan implementasi dari salah satu bagian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja..

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian laporan ini disusun, dan tentunya masih belum sempurna dan terdapat kekurangan di dalamnya, kritik serta saran untuk laporan ini sangat diharapkan, supaya dalam penyusunan laporan pada tahun selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Trenggalek, Februari 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19700907 199003 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Ikhtisar Eksekutif	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan	6
C. Gambaran Singkat BPBD Kab. Trenggalek	6
1. Kedudukan dan tugas pokok Fungsi dan struktur organisasi	6
2. Sumber daya organisasi	11
D. Isu Strategis Perangkat Daerah	15
E. Landasan Hukum	16
F. Sistematika	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	18
B. Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Realisasi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP	60

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam pasal 18 dijelaskan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Berdasarkan hal tersebut, sebagai entitas akuntabilitas kinerja maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai selama 1 (satu) tahun anggaran.
- Mengevaluasi aspek-aspek kinerja keuangan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023.
- Sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Trenggalek, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek, telah ditetapkan dalam 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 4 (empat) indikator. Upaya untuk mencapai sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan penyerapan dana sebesar Rp. Rp. 4.275.920.221,00 atau 97,64% dari total anggaran Rp. 4.379.292.193,00.

Jadi Urusan Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat khususnya Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 secara umum terlaksana sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan, efektif, efisien dan akuntabel.

Namun demikian pelaksanaan penanggulangan bencana untuk kedepannya tentu akan terjadi banyak kendala dan tentunya peran serta masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media dalam mengatasi permasalahan

sangat diperlukan agar penanggulangan bencana di Kabupaten Trenggalek dapat berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Upaya peningkatan dan perbaikan kinerja terus dilakukan dengan cara meningkatkan kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas yang diemban dalam bentuk:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait maupun BPBD Provinsi dan BNPB dalam dukungan sarpras dan logistik bencana;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan dinas terkait dalam menganalisa kebutuhan logistik;
3. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders terkait pemanggulan bencana dengan membangun kerangka regulasi yang jelas ;
4. Memaksimalkan peran TRC dan Pusdalops PB serta meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PB dengan mengikuti bimtek dan duklat kebencanaan;
5. Memberikan sosialisai, informasi dan edukasi kepada masyarakat agar sadar akan bencana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 133 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BPBD Kabupaten Trenggalek pada tahun mendatang, maka dari itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 BPBD Kabupaten Trenggalek berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021- 2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek 2023.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Bupati Trenggalek dalam mewujudkan visi Kabupaten Trenggalek, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumberdaya manusia yang

kreatif dan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development)”, BPBD Kabupaten Trenggalek melaksanakan rumusan Misi yang ke 3 dan 4 yaitu :

- **Misi 3** : Mewujudkan pemerintahan kolaboratif dan mengarustamaan gender dalam rangka memastikan pelayanan yang prima, khususnya pelayanan adminduk, pendidikan dan kesehatan berbasis big data (satu data besar);
- **Misi 4** : Menciptakan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan.

Dengan memperhatikan potensi bencana yang ada di Kabupaten Trenggalek, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan:

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan efisien, produktif dan profesional;
- Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang preventif, responsif dan berkelanjutan

B. Tujuan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban akhir dari pelaksanaan tugas pengendalian program penanggulangan bencana di Kabupaten Trenggalek, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023. Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai perwujudan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran serta target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Mengevaluasi aspek-aspek kinerja keuangan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023;
3. Mendorong BPBD Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;

4. Sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Gambaran Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek

1. Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek merupakan unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan membantu Bupati Trenggalek dalam penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh Kepala BPBD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang dijabat oleh Sekretaris Daerah sebagai Ex-Officio Kepala BPBD Kabupaten Trenggalek. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 133 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Trenggalek mempunyai fungsi sebagai berikut:

- o perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan pengungsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- o pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana dan pengungsi;
- o pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- o penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- o penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- o penyusunan, penetapan, dan penyediaan informasi peta rawan bencana;
- o penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- o pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- o pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan bencana;

- pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga BPBD;
- penyelenggaraan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja BPBD;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi di atas, BPBD mempunyai kewenangan :

- perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana ;
- perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana;
- perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana;
- perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana;
- pengoordinasian pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah daerah;
- pengoordinasian penanggulangan korban bencana;
- pengoordinasian penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah daerah serta koordinasi dengan daerah sekitar;
- pengoordinasian evaluasi sistem drainase dan pengendalian fungsi drainase serta pengendalian banjir;
- pengoordinasian penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana;
- pengoordinasian pelaksanaan standar, prosedur, dan operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana;
- pengoordinasian penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
- pengoordinasian penetapan kawasan yang berisiko rawan bencana;
- pengoordinasian penetapan kawasan yang berisiko menimbulkan bencana lingkungan;

- pengoordinasian penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana;
- pengoordinasian kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah daerah;
- pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah daerah;
- pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah daerah.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. **Kepala Badan.** Secara ex-officio Kepala BPBD dijabat oleh Sekretaris Daerah. Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bupati.
2. **Unsur Pengarah.** Unsur Pengarah terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Kabupaten dan anggota masyarakat profesional dan ahli. Mereka dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek. Unsur pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
Unsur pengarah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.

3. **Unsur Pelaksana.** Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

3.1 Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas menjalankan tugas sehari-hari Kepala BPBD dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara integrasi.

- 3.2 **Sekretariat,** bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Sekretariat membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan yang disetarakan menjadi fungsional

3.3 *Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaandan Kedaruratan*, bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra-bencana, serta pengurangan resiko bencana.

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan membawahi:

- Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang disetarakan menjadi fungsional
- Seksi Kedaruratan yang disetarakan menjadi fungsional

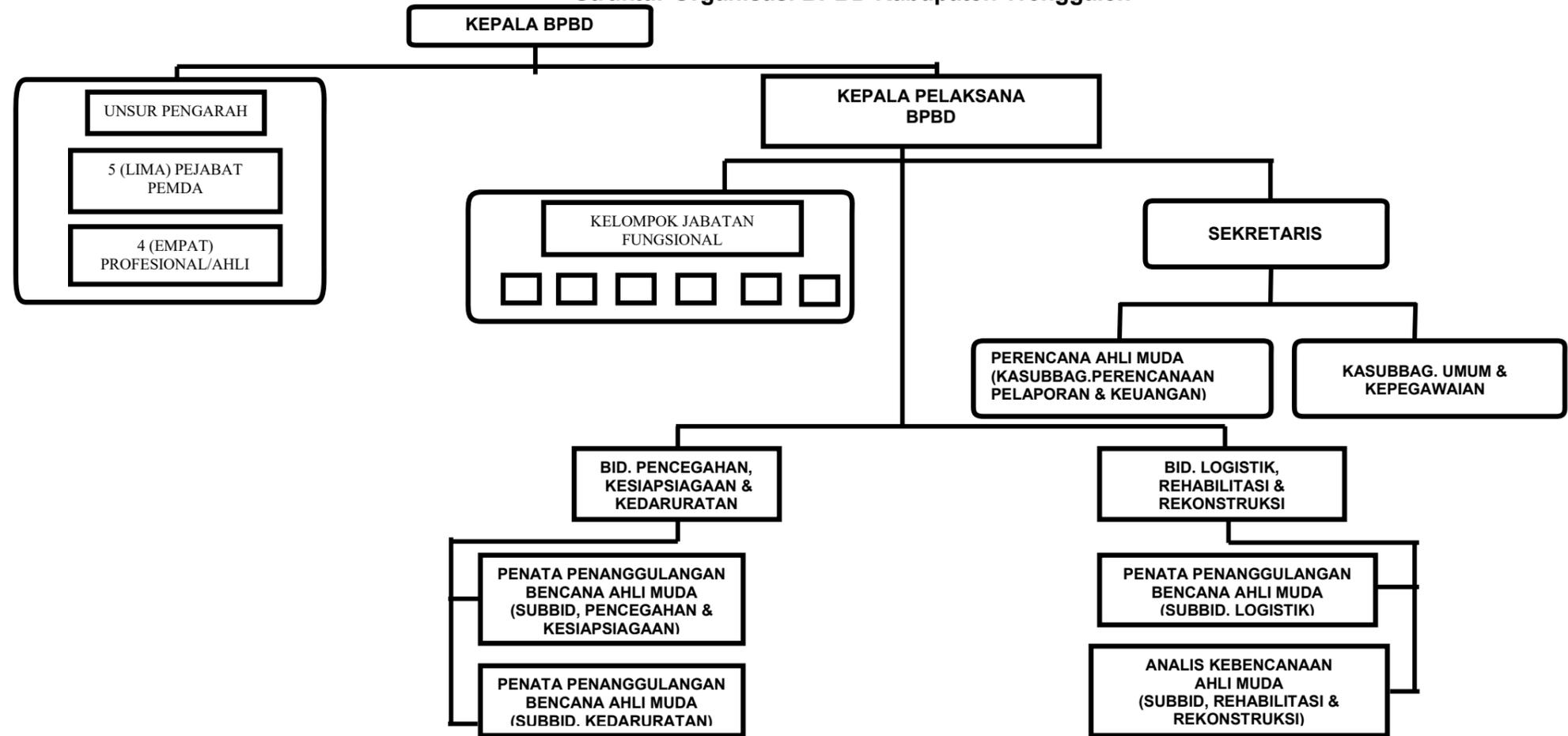
3.4 *Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi*, bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik serta mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana, pengendalian dan pengawasan rehabilitasi, rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik.

Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:

- Seksi Logistik yang disetarakan menjadi fungsional
- Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang disetarakan menjadi fungsional

3.5 *Kelompok Jabatan Fungsional*.

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Trenggalek



2. Sumberdaya Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Trenggalek memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur (kepegawaian) dan sarana prasarana (perlengkapan) pendukung kelancaran kegiatan.

Sumberdaya Aparatur, secara internal, potensi kepegawaian pada BPBD Kabupaten Trenggalek untuk tahun 2023 sebanyak 27 (dua puluh lima) ASN, 25 penunjang kegiatan (7 orang administrasi kantor dan 18 orang petugas Pusdalops PB) dengan susunan sebagai berikut:

SUSUNAN APARATUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023

Keterangan		Tahun 2023
1)	Berdasarkan Golongan :	
	⇒ Golongan IV	4 orang
	⇒ Golongan III	16 orang
	⇒ Golongan II	5 orang
	⇒ Golongan I	2 orang
	⇒ Non PNS	25 orang
	Jumlah	52 orang
2)	Berdasarkan Pendidikan	
	⇒ Lulus S.2, S.1 dan D 4	17 orang
	⇒ Lulus D.3	3 orang
	⇒ Lulus SLTA	6 orang
	⇒ Lulus SLTP	1 orang
	⇒ Lulus SD	
	⇒ Non PNS Lulus SD s.d S1	25 orang
	Jumlah	52 orang

Sarana dan Prasarana, sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas saat ini terus menerus ditingkatkan guna menjadikan BPBD Kabupaten Trenggalek sebagai organisasi yang profesional. Beberapa sarana-prasarana pokok, di luar perangkat standar perkantoran telah dipenuhi antara lain adalah pembangunan gudang penyimpanan peralatan yang memadai sehingga apabila terjadi bencana

sewaktu – waktu dalam pengambilan logistik maupun peralatan penanggulangan bencana juga lebih mudah. Selain itu juga Pembangunan Gedung piket posko Pusdalops yang lebih memadai, guna memberikan pelayanan yang lebih prima terhadap masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah mengunjungi posko karena posisi bangunan berada di depan. Adapun peralatan yang saat ini dimiliki BPBD Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

SARANA DAN PRASARANA PADA BPBD KAB. TRENGGALEK

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI		KET
			BAIK	RUSAK	
A	ALAT ANGKUTAN				
1	Mobil operasional kedinasan	1	-	1	Kondisi kurang baik
2	Mobil operasional bencana banjir, tanah longsor, angin	4	4	-	-
3	Truk Tanki air untuk kekeringan	4	4	-	-
4	Truck pengangkut alat berat (excavator)	1	1	-	-
5	Kendaraan operasional roda 2	24	24	-	-
6	Perahu	2	1	1	
B	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1	Lemari Besi/Metal/Rak Barang	5	5	-	-
2	Filling Besi/Metal/Filling Kabinet	14	14	-	-
3	Brankas	1	1	-	-
4	Lemari sorok/Rool o'pack	1	1	-	-
5	Lemari kayu/ Rak Kayu/ Bufet	6	6	-	-
6	Meja kursi tamu	2	1	1	Kurang baik
7	Kursi Kerja	22	22	-	-
8	Kursi Rapat	64	60	4	Kurang baik
9	Meja Rapat	11	11	-	-
10	Meja Kerja	7	7	-	-
11	Podium	1	-	1	-
12	AC	3	3	-	-

13	Televisi	2	2	-	-
14	Sound System	1	1	-	-
15	Camera	3	1	2	-
16	Handycam	2	2	-	-
17	Tenda	13	13	-	-
18	Velbed	18	18	-	-
19	Mesin Absensi	3	3	-	-
20	Alat Pemadam/ Portable	6	6	-	-
21	Unit Power Supply	1	1	-	-
22	LCD Projector	1	1	-	-
23	Kompor Gas	1	1	-	-
24	Kipas Angin	2	2	-	-
25	Tangga aluminium	2	2		
26	kulkas	1	1		
27	Lain-lain/ senter	5	5		
C	KOMPUTER				
18	Notebook/Laptop	17	17	-	
2	Komputer dan PC	7	7	-	
3	Monitor	2	1	1	
4	Printer	23	23	-	
5	LCD/SCREEN	4	4	-	
D	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
1	Microphone/ Wireless Mic	1	1	-	-
2	Telephone (pabx)/Handphone	9	9	-	-
3	Facsimile	1	1	-	-
4	HT (handy talki)	112	112	-	-
5	Uniterruptible Power Supply (Ups)	6	6	-	-
6	Radio Rig	5	5	-	-
7	Unit Trasnceiver Ssb Portable	1	1	-	-
8	Lan-lain(drone)	1	1		-
9	Tripot camera	1	1	-	-
10	Box Battery (Batre drone)	1	1		
E	ALAT PERSEJAJAAN				
1	Lain-lain / Mesin perahu karet	1	1	-	-
2	Alat Khusus SAR (Search And	13	13	-	-

	Resque)				
3	Lain-laian/ Alat Khusus Keamanan Lainnya	9	9	-	-
4	Pelampung	110	110	-	-
F	ALAT PERTANIAN				
1	Chain Saw / Chain saw	23	23	-	-
2	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	2	2	-	-
G	ALAT ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
1	Dongkrak Hidrolik / Dongkrak mobil PMK & Water Suplier	4	4	-	-
2	Lain-lain / GPS	1	1	-	-
3	Tool Set	1	1	-	-
4	Derek Kaki 3 Lengkap Katrol	1	1	-	-
6	GLOBAL POSTIONING AYSTEM	1	1	-	-
7	Peralatan Las Listrik	1	1		
H	ALAT - ALAT BESAR				
1	Water Treatment	1	1	-	-
2	Stationary Generating Set	2	2	-	-
3	Portable Compresor	1	-	1	-
4	Floating Excavator	1	1	-	-
5	Portable Water Pump	2	2	-	-
I	ALAT LABORATORIUM				
1	Saw Machine For Concrete	1	1	-	-
J	ALAT KESELAMATAN KERJA				
1	'Thermal Imaging Camera	6	6	-	-1

Sumberdaya Keuangan, untuk Tahun 2023 dalam melaksanakan sasaran *Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat*, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Trenggalek didukung dana APBD kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 4.379.292.193,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.275.920.221,00 (97,64%).

Untuk mencapai pelaksanaan *urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat* yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan program – program sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.379.292.193,00
2) Program Penanggulangan Bencana	Rp	369.497.000,00
Jumlah	Rp	4.379.292.193,00

D. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian sasaran perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Penanggulangan bencana dengan cepat, tepat dan tanggap berpedoman pada manajemen bencana;
2. Peningkatan kesadaran stakeholder/ masyarakat dalam penanggulangan bencana;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan logistik
4. Peningkatan kualitas SDM dalam penanggulangan bencana;
5. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah periode 2021 - 2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penanggulangan bencana dengan cepat, tepat dan tanggap berpedoman pada manajemen bencana, dengan melaksanakan di saat pra bencana dengan peningkatan SDM dan kapasitas masyarakat melalui pembentukan DESTANA dan sosialisai KIE; Pada saat bencana melalui pembentukan posko bencana, distribusi logistic kepada warga

- yang terdampak bencana; Pada pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu penyusunan dokumen kerusakan karena bencana ;
2. Peningkatan kesadaran stakeholder/ masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui pembentukan DESTATAN dan sosialisasi KIE;
 3. Peningkatan pemenuhan logistic, melalui pendistribusian logistic kepada warga terdampak bencana berupa distribusi paket sembako, air bersih;
 4. Peningkatan kualitas SDM dalam penanggulangan bencana, melalui bimtek kebencanaan peningkatan kapasitas aparatur ;
 5. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, melalui pemasangan rambu rambu kebencanaan, pengadaan sarpras PB;
 6. Peningkatan Koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana, melalui pembentukan TRC - PB Multi Sektor yang beranggotakan dari Kodim, Koramil, OPD terkait kebencanaan , Kecamatan, seluruh pegawai BPBD dan relawan dari 14 kecamatan.

E. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 adalah:

BAB I	Pendahuluan Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	Perencanaan Kinerja Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	Akuntabilitas Kinerja Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	Penutup
LAMPIRAN	Berisi data data lain yang dibutuhkan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program

Visi merupakan gambaran tentang masa depan, berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Rumusan Visi Pemerintah Kabupaten Trenggalek seperti yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - 2026 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBER DAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUTAINABLE DEVELOPMENT)”.

Dari rumusan visi tersebut diatas mengandung arti :

- **MAJU** berarti Terwujudnya masyarakat Trenggalek yang unggul dan berdaya saing didasari produktivitas, kreativitas, kerjasama yang sinergis dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi.
- **EKONOMI INKLUSIF** berarti Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid – 19 melalui penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.
- **SDM KREATIF** berarti SDM yang mampu menciptakan ide atau gagasan yang baru, memiliki jiwa profesional dengan tetap menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek.
- **PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** berarti Pembangunan yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan didukung SDM Kreatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (environmental carrying capacity) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi.

Berpedoman pada arah pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Trenggalek 2005-2025, dan berbagai capaian pembangunan periode 2021-2026 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kabupaten Trenggalek lima tahun ke

depan, dan visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek terpilih (2016-2021), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju Kabupaten Trenggalek lebih baik, dan lebih sejahtera.

Visi **“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”** berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Trenggalek juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan, serta kesejahteraan Kabupaten Trenggalek secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”** tersebut, ditempuh melalui 4 misi, adalah sebagai berikut :

1. Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;
2. Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar);
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan.

Dengan memperhatikan visi Kabupaten Trenggalek, **“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”**, BPBD Kabupaten Trenggalek melaksanakan rumusan Misi yang ke 3 dan 4 yaitu :

3. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan

Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar);

4. Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan.

Dengan memperhatikan potensi bencana yang ada di Kabupaten Trenggalek, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional;
2. Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana preventive, resposiif dan berkelanjutan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada misi dan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, maka sasaran strategis yang ingin dicapai BPBD Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan sasaran di atas, maka dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek menyusun suatu program kerja operasional berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- b. Program Penanggulangan Bencana.

Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek 2021-2026, maka rumusan strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek sebagai berikut adalah :

**Sasaran dan Strategi BPBD
Kabupaten Trenggalek**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Mengoptimalkan fungsi sekretariat sebagai koordinator perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan ketertiban administrasi pemerintahan; 2. Peningkatan fungsi SPIP Perangkat Daerah; 3. Penyusunan dokumen pelaporan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan pelaporan program kegiatan pembangunan.
Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana preventive, resposiif dan berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Meningkatkan manajemen resiko bencana dalam setiap tahapan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembentukan jumlah desa tangguh bencana 2. Meningkatkan peran masyarakat (stakeholders) untuk menyiapkan ketangguhan menghadapi bencana 3. Peningkatan respon cepat dalam penanganan darurat bencana dan distiiibusi logistic bagi korban bencana 4. Peningkatan sarana dan prasarana untuk kesiapsiagaan PB 5. Koordinasi dengan OPD terkait untuk rehabilitasi dan rekonstrksi kerusakan pasca bencana.

Rencana Kerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi BPBD Kabupaten Trenggalek untuk mencapai sasaran dan kegiatan dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya, Rencana Kinerja Tahunan BPBD Kab. Trenggalek untuk Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023

Sasaran			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Keterangan
Uraian	Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Katagori Nilai) SAKIP	80,75 (A)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	
				Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11 Dokumen	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	

Sasaran			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Keterangan
Uraian	Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 personil	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Diselesaikan	100 %	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	

			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket				
Sasaran			Uraian	Indikator	Target	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Keterangan
1	2	3							
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit				
Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Prosentase desa tangguh bencana (desa/ kelurahan rawan bencana)	31,85 %	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana)	31,85 %				
	Prosentase kejadian bencana yang tertangani	100 %		Persentase kejadian bencana yang tertangani	100 %				
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan informasi rawan bencana yang dilakukan	1 kali				

			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	175 Orang	
Sasaran						
Uraian	Indikator	Target	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana yang dilakukan	10 kali	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	4 dokumen	
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 kawasan	
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	185 Orang	
			Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilakukan	48 kali	

			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 dokumen	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	110 Orang	
Sasaran						
Uraian	Indikator	Target	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 dokumen	
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilaksanakan	16 kali	
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	12 Dokumen	
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	4 Dokumen	

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 31 bulan Maret tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Katagori Nilai) SAKIP Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (katagori nilai) Nilai	80,75 (A) 86
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada pra, saat dan pasca bencana	Persentase Desa Tangguh Persentase Kejadian Bencana yang Tertanganai	% %	31,85 100

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.763.565. 977,00
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 350.000.000,00

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian sasaran kinerja.

Pada tanggal 27 bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan dalam strategi yang dipengaruhi pencapaian sasaran kinerja (perubahan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Katagori Nilai) SAKIP	Nilai (katagori nilai)	80,75 (A)

		Nilai Kepuasan Masyarakat	Indek	Nilai	86
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Tangguh	Desa	%	31,85
		Persentase Bencana Tertangani	Kejadian yang	%	100

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perubahan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 4.009.795.193,00
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 369.497.000,00

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidak-berhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang akhirnya dapat disimpulkan, adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, diolah pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPBD Kabupaten Trenggalek.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100 %	Sangat baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian keseluruhan target pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 yang disusun berdasarkan tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

Tujuan : 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional;

2. Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana preventive, resposiif dan berkelanjutan.

3.A.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.2 SASARAN STRATEGIS 1

Merupakan Sasaran dalam mendukung Misi 3 Bupati Trenggalek
Tingkat Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Trenggalek

MISI 3 BUPATI				
Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)				
TUJUAN 1.1				
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional				
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.1.1				
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif han efisien	Nilai (Katagori Nilai) SAKIP	80,75 (A)	85,11 (A)	105 %
	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	86	99,30	115%
Nilai capaian kinerja rata-rata				110 %

Sasaran strategis 1, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung Misi 1 Bupati, sebagaimana table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. *Nilai Indek Kepuasan Masyarakat*

Indek Kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan

untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan publik selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu : Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penangan Pengaduan, saran dan Masukan, dan Sarana dan Prasarana. Tahun 2023 berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan angka Indeks sebesar : 99,30 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, yang mana target kinerja kita 86 sehingga realisasi capaian kinerja 115 %.

- b. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP, merupakan indikator atas penilaian hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat.

Tahun 2023 evaluasi SAKIP dari Inspektorat nilai A (85,11) sebagaimana yang telah ditargetkan 80,75, sehingga capaian kinerja 105 %.

Dari analisa diatas dapat diketahui bahwa, **rata – rata capaian kinerja dengan Sasaran Strategis 1 BPBD Kabupaten Trenggalek dalam mendukung Misi 3 Bupati adalah 110 % (kategori Sangat Baik).**

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran 1 adalah dengan melaksanakan program/kegiatan, sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan ;

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dilaksanakan dengan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 12 dokumen (Perjanjian Kinerja 2023, DPA 2023, Rencana Aksi, Laporan Kinerja Tahun 2022, SAKIP, Rencana Kerja 2024, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, Perubahan RKA/DPA Tahun 2023, RKA/DPA Taun 2024) ;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dilaksanakan dengan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk 27 orang/bulan dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 12 dokumen.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dilaksanakan dengan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

sebanyak 8 laporan (Laporan persediaan, KIP, mutasi barang, berita acara rekon, labelisasi, surat pemegang barang inventaris, berita acara pinjam pakai, rencana kebutuhan barang milik daerah)

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilaksanakan dengan pengiriman diklat sesuai tugas dan fungsi sebanyak 7 orang dengan pelatihan dasar manajemen bencana, bimtek pusdal PB tema menumbuh kembangkan potensi Pusdalop PB dalam integrasi satu data bencana, workshop pengelolaan kepegawaian terintegrasi, pelatihan asesor kompetensi LSP BNPB 2023, workshop inovatif leadership for digital transformation.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan dengan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 3 paket, penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 5 paket, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan penyediaan sebanyak 3 paket, Penyediaan Bahan/Material sebanyak 9 paket, penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi sebanyak 41 kali.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 4 unit (4 unit printer).
7. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang umum urusan pemerintah, dilaksanakan dengan penyediaan 12 laporan untuk belanja air, listrik, telpon, internet, dan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 13 dokumen laporan penerimaan honorarium tenaga penunjang.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan pemeliharaan kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10 unit, alat berat 1 unit, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 9 unit (computer/laptop, AC, Printer) dan pemeliharaan 1 unit gedung perkantoran ;

Penggunaan sumberdaya keuangan untuk pencapaian **Sasaran 1** adalah Rp. 3.930.523.546,00 atau 98,02 % dari total pagu Rp. 4.009.975.193,00. Hal ini terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 1,98 % dari pagu yang ditetapkan (capaian kinerja – realisasi anggaran atau 100 % - 98,02 %).

Tabel 3.3 SASARAN STRATEGIS 2

Merupakan Sastra dalam mendukung Misi 4 Bupati Trenggalek
Tingkat Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Trenggalek

MISI 4 BUPATI Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan				
TUJUAN 4.2 Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana perferentiv, responsive dan berkelanjutan				
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.2.2 Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Presentase desa tangguh bencana (desa/kelurahan rawan bencana)	31,85%	31,85%	100%
	Presentase kejadian bencana yang tertangani	100 %	100 %	100 %
Nilai capaian kinerja rata-rata				100 %

Sasaran strategis 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung Misi 4 Bupati, sebagaimana table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Presentase desa tangguh bencana (desa/ kelurahan rawan bencana)* dengan target pada tahun 2023 sebesar 31,85% % dan terealisasi 31,85% % atau dengan tingkat capaian sebesar 100 %, dilaksanakan dengan pelatihan dan pembentukan desa tangguh bencana untuk bencana longsor/tanah gerak di Desa Gamping, Nglebo, Ngrandu, Puru Kecamatan Suruh dan pemasangan rambu dan penetapan jalur evakuasi di desa tangguh bencana yang telah terbentuk.

Sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 50 desa tangguh bencana dari 157 desa/kelurahan di Kabupaten Trenggalek yang rawan bencana. Adapun desa tangguh bencana yang sudah terbentuk dengan rincian sebagai berikut :

1. *Desa tangguh bencana tsunami (13 desa) :*
 - a). Desa Tasikmadu, Desa Margomulyo, Desa Karangandu, Desa Prigi Kec. Watulimo ; b). Desa Munjungan, Desa Tawing, Desa Masaran, Desa Craken, Desa Ngulungwetan Kec. Munjungan ; c). Desa Panggul, Desa Wonocoyo, Desa Nglebeng, Desa Banjar Kec. Panggul
2. *Desa tangguh bencana banjir (13 desa/kel) :*
 - a). Desa Pogalan, Desa Bendorejo, Desa Ngadirenggo Kec. Pogalan; b). Desa Bendoagung, Desa Karangrejo, Desa Bogoran Kec. Kampak; c). Kel. Tamanan, Kel. Kelutan, Desa Ngares, Desa Sumberdadi, Desa Parakan

Kec. Trenggalek ; d). Desa Ngrayung, Desa Jajar, Desa Wonokerto Kec. Gandusari; e). Desa Depok Kecamatan Bendungan

3. *Desa Tangguh Bencana Longsor / Tanah Gerak (24 desa) :*

a). Desa Siki Kec. Dongko ; b). Desa Depok , Surenlor, Sengon, Dompjong, Srabah Kec. Bendungan ; c). Desa Parakan, Dawuhan, Sokosari Kec. Trenggalek; d). Desa Pucanganak, Prambon, Nglinggis, Duren, Gading Kec. Tugu; d). Desa Pule, Jombok, Sidomulyo, Puyung Kec. Pule; e). Desa Gampng, Nglebo, Ngrandu, Puru Kec. Suruh

- b. *Presentase kejadian bencana yang tertangani dengan target 100 % dan realisasi 100% dengan formulasi jumlah kejadian bencana yang tertangani dibagikan dengan total kejadian bencana pada tahun berkenaan dikalikan 100%, pada tahun 2023 total kejadian bencana ada 408 kejadian dan yang tertangani ada 408 kejadian bencana.*

Untuk mencapai **Sasaran Strategis 2** dilaksanakan dengan **Program Penanggulangan Bencana**, yang dijabarkan dalam kegiatan :

1. Kegiatan Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan sub kegiatan :
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana). Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana yaitu sebanyak 175 orang untuk pelaksanaannya pada SMP 2 Bendungan.
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dilaksanakan dengan sub kegiatan :
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 4 dokumen ;
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana ada 4 desa yaitu Desa Gamping, Nglebo, Ngrandu, Puru Kec. Suruh;

- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota. Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya ada 185 orang;
 - Penyusunan Rencana Kontijensi. Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi 1 dokumen renkon banjir.
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan ada 155 Orang.
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dilaksanakan dengan sub kegiatan :
- Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/kota, respon cepat darurat penanganan bencana yang dilaksanakan . SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan ada 4 dokumen yaitu : 1) SK tentang status transisi darurat ke pemulihan tahun 2023 di kab. Trenggalek, 2) SK Kekeringan, 3) SK Darurat Karhutla, 4) SK Siaga Hidrometeorologi.
 - Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana ada 110 orang (paket sembako).
 - Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit. SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu ada 1 dokumen SK Presiden RI tentang Darurat Covid 19
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan sub kegiatan :
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan. Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan ada 12 dokumen (12 bulan laporan kejadian bencana)
 - Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota. Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) ada 4 dokumen (laporan identifikasii kerusakan akibat bencana yangdi susun per triwulan).

Dari analisa diatas dapat diketahui bahwa, capaian kinerja dengan Sasaran Strategis 2 BPBD Kabupaten Trenggalek dalam mendukung Misi 4 Bupati adalah 100 % (kategori Baik).

Penggunaan sumberdaya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2 adalah Rp. 345.396.675,00 atau 93,48 % dari total pagu Rp. 369.497.000,00. Hal ini terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 6,52 % dari pagu yang ditetapkan (capaian kinerja – realisasi anggaran atau 100 % - 93,48 %).

3.A.2. Membandingkan Antara Target Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja
Per Sasaran Statigis dalam mendukung Misi 3 dan Misi 4
Bupati Trenggalek

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi			
		Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Katagori Nilai) SAKIP	80.25 (A)	80.50 (A)	80.75 (A)	81 (A)	81.25 (A)	81.50 (A)	83,78 (A)	84,05 (A)	85,11 (A)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	86	87	87,5	88	89,38	91,45	99,30
Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana (desa/kelurahan rawan bencana)	26,75	29,30	31,85	34,39	36,94	39,49	26,75	29,30	31,85
	Persentase kejadian bencana yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel 3.4 dapat dijelaskan untuk perbandingan capaian dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 per indikator sebagai berikut :

- a. *Nilai (Katagori Nilai) SAKIP*, dari tabel diatas menunjukkan bahwa target kinerja untuk nilai (katagori nilai) SAKIP dari Tahun 2021 sampai dengan

Tahun 2023 untuk realisasi memenuhi target dan realisasi tiap tahunnya mengalami peningkatan dari target kinerja yang telah ditetapkan.

- b. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat, dari tabel diatas menunjukkan bahwa target kinerja Nilai Indek Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 untuk realisasi memenuhi target dan realisasi tiap tahunnya mengalami peningkatan dari target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. *Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana)*, dari tabel diatas menunjukkan bahwa target kinerja Persentase Desa Tangguh Bencana (desa Rawan Bencana) dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 untuk realisasi memenuhi target dan realisasi tiap tahunnya mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya.
- d. Presentase kejadian bencana yang tertangani, dari tabel diatas menunjukkan bahwa target kinerja Persentase kejadian bencana yang tertangani dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 untuk realisasi sesuai dengan target setiap tahunnya.

3.A.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023			Rentra Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Ralisasai s/d Tahun 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif han efisien	Nilai (Katagori Nilai) SAKIP	80.75 (A)	85,11 (A)	105%	80.75 (A)	85,11 (A)	105%
	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	86	99,30	115%	86	99,3	115%
Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Presentase desa tangguh bencana (desa/kelurahan rawan bencana)	31,85%	31,85%	100%	31,85%	31,85%	100%
	Presentase kejadian bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target capaian tahun 2023 sama dengan target Renstra tahun 2023. Realisasi kinerja indikator Nilai (Katagori Nilai) SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 memperoleh nilai 85,11 (A) realisasi ini melampaui dari target yang ditetapkan pada tahun tersebut dengan capaian sebesar 105%. Untuk Realisasi kinerja pada indikator Nilai indek Kepuasan Masyarakat sebesar 99,30 realisasi ini melampaui dari target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut dengan capaian 115%. Sedangkan realisasi kinerja pada indikator Persentase Desa Tangguh Bencana (desa/ kelurahan rawan bencana) pada tahun 2023 adalah sebesar 31,85%, realisasi ini sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut dengan capaian 100%. Untuk realisasi kinerja pada indikator Persentase kejadian bencana yang tertangani juga tercapai 100 % dengan capaian 100%. Untuk perencanaan ke depan, selain diukur dengan membandingkan capaian tahun sebelumnya, maka perlu kiranya untuk mengetahui persentase capaian dengan target renstra di tahun-tahun perencanaan berikutnya, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menyusun action plan terbaik guna terpenuhinya target capaian pada tahun yang akan datang.

A.3.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja BPBD Kabupaten Trenggalek dibandingkan dengan realisasi kinerja BPBD Propinsi Jawa Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/
Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	STANDAR NASIONAL	Daerah	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5		6=4/5*100
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82,94	82,5	BPBD Propinsi Jatim	101%
	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Jawa Timur	Prosentase Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana didaerah Rawan Bencana	63,64%	28,41%	BPBD Propinsi Jatim	224%
	Meningkatnya respon cepat dalam penanganan kedaruratan bencana di Jawa Timur	Persentase korban terdampak bencana yang ditangani	100%	100%	BPBD Propinsi Jatim	100%

	Meningkatnya pemulihan pasca bencana di Jawa Timur	Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100%	100%	BPBD Propinsi Jatim	100%
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai (Katagori Nilai) SAKIP	85,11 (A)	80,75 (A)	BPBD Kab. Trenggalek	105%
		Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	99,30	86	BPBD Kab. Trenggalek	115%
	Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Presentase desa tangguh bencana (desa/kelurahan rawan bencana)	31,85%	31,85%	BPBD Kab. Trenggalek	100%
		Presentase kejadian bencana yang tertangani	100%	100%	BPBD Kab. Trenggalek	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua target indikator kinerja utama pada BPBD Propinsi Jawa Timur dan BPBD Kabutaten Trenggalek tercapai, yang mana dapat dilihat pada IKU Propinsi BPBD Propinsi Jawa Timur indikator kinerja Nilai evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah capaian 101%; Indikator Kinerja Prosentase Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana didaerah Rawan Bencana capaian 224%, indikator kinerja Persentase korban terdampak bencana yang ditangani capaian 100%; Indikator Kinerja Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan capaian 100% dan Pada BPBD Kabupaten Trenggalek indikator kinerja Nilai (Katagori Nilai) SAKIP capaian 105%; indikator kinerja Nilai Indek Kepuasan Masyarakat capaian 115%; indikator kinerja Presentase desa tangguh bencana (desa/kelurahan rawan bencana) capaian 100%; indikator kinerja Presentase kejadian bencana yang tertangani capaian 100%

A.3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek selama tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama ditunjukkan dala tabel di bawah ini :

Tabel 3.7 Analisis Penyebab Keberhasilan /
kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	80,75 (A)	85,11 (A)	105%
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86	99,30	115%
Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana (desa/kelurahan rawan bencana)	31,85%	31,85%	100%
	Persentase kejadian bencana yang tertangani	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja pada indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP pada BPBD tahun 2023 adalah 85,11 (A) atau tercapai sebesar 105% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 80,75 (A). Untuk indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 yaitu 99,30 atau tercapai 115% dari target yang telah ditetapkan tahun 2023 yaitu 86.

Sedangkan indikator Persentase Desa Tangguh Bencana (desa/ kelurahan rawan bencana) menunjukkan angka yang memuaskan yaitu 31,85%, angka ini sesuai target yang telah ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 31,35% atau tercapai 100%. Untuk capaian kinerja pada indikator Persentase kejadian bencana yang tertangan menunjukkan angka yang sangat memuaskan yaitu mencapai 100% artinya dari 408 kejadian bencana sepanjang tahun 2023, seluruh kejadian bencana telah direspon dan ditangani dengan baik dan cepat dalam waktu kurang dari 24 jam.

Di balik angka capaian kinerja yang sangat memuaskan tersebut tidak lepas dari dukungan Pemerintah Daerah kepada BPBD Kabupaten Trenggalek, salah satunya

yaitu kebutuhan anggaran pada saat tanggap darurat bencana dapat dipenuhi dari Dana BTT (Belanja Tidak Terduga). Selain dukungan tersebut yang merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja, BPBD Kabupaten Trenggalek juga menghadapi beberapa kendala dan hambatan.

Kendala dan hambatan tersebut belum semuanya dapat ditanggulangi karena adanya faktor internal dan eksternal. Beberapa kendala dan hambatan yang terjadi berikut solusi yang telah dilaksanakan, antara lain:

Dalam pelaksanaan program/kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek selama tahun anggaran 2023 terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Belum terpenuhinya/ tersediannya peralatan dan sarpras penanggulangan bencana yang sesuai dengan standart/ketentuan BNPB;
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam menganalisa kebutuhan logistik terutama ketika terjadi bencana;
3. Lemahnya koordinasi antar stakeholders dalam penanggulangan bencana ;
4. Terlalu luasnya cakupan wilayah yang memiliki multi resiko bencana;
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas keberadaan BPBD dalam perannya sebagai kordinator penangulungan bencana.

Upaya peningkatan dan perbaikan kinerja terus dilakukan dengan cara meningkatkan kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas yang diemban dalam bentuk:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait maupun BPBD Provinsi dan BNPB dalam dukungan sarpras dan logistik bencana;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan dinas terkait dalam menganalisa kebutuhan logistik;
3. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders terkait pemanggulungan bencana dengan membangun kerangka regulasi yang jelas ;
4. Memaksimalkan peran TRC dan Pusdalops PB serta meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PB dengan mengikuti bimtek dan duklat kebencanaan;
5. Memberikan sosialisasai, informasi dan edukasi kepada masyarakat agar sadar akan bencana.

A.3.6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tabel di bawah ini, penggunaan sumber daya Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek pada umumnya menunjukkan efisiensi dalam pengelolaannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi (5/8)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	80.75 (A)	85,11 (A)	105%	4.009.795.193	3.930.523.546	98,02%	107,12%
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86	99,3	115%				117,32%
Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana (desa/kelurahan rawan bencana)	31,85%	31,85%	100%	41.014.960	39.880.000	97,23%	102,85%
	Persentase kejadian bencana yang tertangani	100%	100%	100%	328.482.040	305.516.675	93,01%	107,52%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator kinerja yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Dari tabel diatas menunjukkan tingkat efisiensi masing-masing indikator atas penggunaan sumberdaya yang diukur dari capaian kinerja IKU Kepala PD dengan capaian kinerja realisasi anggaran. Tingkat efisiensi pada indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP 107,12 dan pada indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 117,32. Sedangkan tingkat efisiensi pada indikator Persentase desa tangguh bencana (desa/kelurahan rawan bencana) sebesar 102,85 menunjukkan penggunaan dana telah optimal dan telah sesuai dengan target dan untuk indikator Persentase kejadian bencana yang tertangani tingkat efisiensi 107,52.

A.3.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja

Beberapa program/ kegiatan/ sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dalam menunjang pencapaian kinerja yang ditargetkan dan berdasarkan IKU dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini

Tabel 3.9

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Realisasi	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.379.292.193	4.275.920.221	97,64%	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	80,75 (A)	85,11 (A)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	4.009.795.193	3.930.523.546	98,02%	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86	99,30		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %				
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	12 Dokumen	1.150.000	1.095.000	95,22%	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11 Dokumen	12 Dokumen	1.150.000	1.095.000	95,22%	tidak ada permasalahan sisa anggaran karena adanya selisih harga dengan SSH dan pembulatan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	3.161.439.393	3.091.762.752	97,80%	

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Realisasi	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	27 orang/bulan	3.104.239.393	3.034.562.752	97,76%	realisasi sesuai dengan kebutuhan (ada 1 pegawai yang pensiun)
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	57.200.000	57.200.000	100,00%	tidak ada permasalahan
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	19.020.000	18.830.000	99,00%	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	19.020.000	18.830.000	99,00%	tidak ada permasalahan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	7.000.000	6.940.000	99,14%	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 personil	7 personil	7.000.000	6.940.000	99,14%	tidak ada permasalahan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Diselesaikan	100 %	100 %	128.737.026	127.680.842	99,18%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	5.000.000	4.990.000	99,80%	tidak ada permasalahan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	22.080.000	21.675.000	98,17%	tidak ada permasalahan sisa anggaran karena adanya selisih harga dengan SSH dan pembulatan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	5.000.000	4.977.000	99,54%	tidak ada permasalahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	9 Paket	31.182.000	30.915.100	99,14%	tidak ada permasalahan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	41 Laporan	65.475.026	65.123.742	99,46%	tidak ada permasalahan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	4.400.000	4.200.000	95,45%	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	4.400.000	4.200.000	95,45%	tidak ada permasalahan sisa anggaran karena adanya selisih harga dengan SSH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	559.666.400	554.732.088	99,12%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	66.966.400	62.032.088	92,63%	Realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran terbesar pada internet kerana selisih harga pada SSH
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Dokumen	13 Dokumen	492.700.000	492.700.000	100,00%	tidak ada permasalahan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	128.382.374	125.282.864	97,59%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	102.900.000	100.129.864	97,31%	tidak ada permasalahan sisa anggaran terbesar pada pajak kendaraan karena adanya selisih harga dengan SSH
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 unit	1 unit	15.000.374	14.750.000	98,33%	tidak ada permasalahan sisa anggaran karena adanya selisih harga dengan SSH
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	9 unit	2.500.000	2.470.000	98,80%	tidak ada permasalahan sisa anggaran karena adanya selisih harga dengan SSH
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	7.982.000	7.933.000	99,39%	tidak ada permasalahan
Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana (desa/ kelurahan rawan bencana)	31,85 %	31,85 %	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana)	31,85 %	31,85 %	369.497.000	345.396.675	93,48%	
	Persentase kejadian bencana yang tertangani	100 %	100 %		Persentase kejadian bencana yang tertangani	100 %	100 %				
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan informasi rawan bencana yang dilakukan	1 kali	1 kali	25.474.200	21.586.350	84,74%	

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Realisasi	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	175 Orang	175 Orang	25.474.200	21.586.350	84,74%	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran pada BBM dan mamin sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana yang dilakukan	10 kali	10 kali	184.853.791	172.958.417	93,56%	
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen	27.023.631	23.056.247	85,32%	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran terbesar pada pemeliharaan repiter dan mamin sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Realisasi	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 kawasan	4 kawasan	41.014.960	39.880.000	97,23%	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran terbesar pada honor narasumber karena sesuai dengan aturan jika nara sumber dari dalam OPD sendiri diberikan 50% dan mamin sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	185 Orang	185 Orang	82.000.000	79.526.170	96,98%	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran terbesar pada honor narasumber karena sesuai dengan aturan jika nara sumber dari dalam OPD sendiri diberikan 50% dan mamin sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Realisasi	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	24.925.200	21.773.000	87,35%	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran pada BBM dan SPPD sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	155 orang	9.890.000	8.723.000	88,20%	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran pada mamin sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilakukan	48 kali	147 kali	112.177.709	105.699.008	94,22%	
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 dokumen	4 dokumen	38.377.841	34.772.104	90,60%	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran pada mamin sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Realisasi	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	110 Orang	110 Orang	68.800.000	68.067.904	98,94%	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran pada SPPD sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023
				Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 dokumen	1 dokumen	4.999.868	2.859.000	57,18%	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran pada mamin, sub kegiatan ini untuk mendukung percepatan penanganan covid 19 dan setelah ada kepres no 17 tentang penetapan berakhirnya covid 19 kegiatan tidak dilaksanakan lagi sehingga tidak ada realisasi anggaran
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilaksanakan	16 kali	16 kali	46.991.300	45.152.900	96,09%	
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	12 Dokumen	12 Dokumen	14.414.300	12.576.000	87,25%	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran pada mamin sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Realisasi	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	4 Dokumen	4 Dokumen	32.577.000	32.576.900	100,00%	tidak ada permasalahan

Total anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 adalah sebesar Rp 4.379.292.193; yang seluruhnya bersumber dana dari APBD. Dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan utamanya dalam pencapaian target IKU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyerap anggaran sebesar Rp 4.275.920.221,-. Realisasi penyerapan anggaran sebesar 97,64% tersebut cukup menunjukkan dukungan pada program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan.

3.B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari seluruh program/kegiatan/sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebesar 97,64%. Tidak ada permasalahan dan berjalan dengan baik namun ada beberapa kegiatan yang mendapatkan kendala sehingga realisasi anggaran tidak maksimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.B.1 Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		Keterangan
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.379.292.193	4.275.920.221	97,64	103.371.972	2,36	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.009.795.193	3.930.523.546	98,02	79.271.647	1,98	
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.150.000	1.095.000	95,22	55.000	4,78	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.150.000	1.095.000	95,22	55.000	4,78	tidak ada permasalahan sisa anggaran karena adanya selisih harga dengan SSH dan pembulatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.161.439.393	3.091.762.752	97,80	69.676.641	2,20	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.104.239.393	3.034.562.752	97,76	69.676.641	2,24	realisasi sesuai dengan kebutuhan (ada 1 pegawai yang pensiun)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.200.000	57.200.000	100,00	0	0,00	tidak ada permasalahan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.020.000	18.830.000	99,00	190.000	1,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.020.000	18.830.000	99,00	190.000	1,00	tidak ada permasalahan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.000.000	6.940.000	99,14	60.000	0,86	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		Keterangan
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.000.000	6.940.000	99,14	60.000	0,86	tidak ada permasalahan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.737.026	127.680.842	99,18	1.056.184	0,82	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.990.000	99,80	10.000	0,20	tidak ada permasalahan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.080.000	21.675.000	98,17	405.000	1,83	tidak ada permasalahan sisa anggaran karena adanya selisih harga dengan SSH dan pembulatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	4.977.000	99,54	23.000	0,46	tidak ada permasalahan
Penyediaan Bahan/Material	31.182.000	30.915.100	99,14	266.900	0,86	tidak ada permasalahan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.475.026	65.123.742	99,46	351.284	0,54	tidak ada permasalahan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.400.000	4.200.000	95,45	200.000	4,55	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.400.000	4.200.000	95,45	200.000	4,55	tidak ada permasalahan sisa anggaran karena adanya selisih harga dengan SSH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.666.400	554.732.088	99,12	4.934.312	0,88	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.966.400	62.032.088	92,63	4.934.312	7,37	Realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran terbesar pada internet kerana selisih harga pada SSH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	492.700.000	492.700.000	100,00	0	0,00	tidak ada permasalahan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.382.374	125.282.864	97,59	3.099.510	2,41	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		Keterangan
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.900.000	100.129.864	97,31	2.770.136	2,69	tidak ada permasalahan sisa anggaran terbesar pada pajak kendaraan karena adanya selisih harga dengan SSH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	15.000.374	14.750.000	98,33	250.374	1,67	tidak ada permasalahan sisa anggaran karena adanya selisih harga dengan SSH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	2.470.000	98,80	30.000	1,20	tidak ada permasalahan sisa anggaran karena adanya selisih harga dengan SSH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.982.000	7.933.000	99,39	49.000	0,61	tidak ada permasalahan
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	369.497.000	345.396.675	93,48	24.100.325	6,52	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	25.474.200	21.586.350	84,74	3.887.850	15,26	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	25.474.200	21.586.350	84,74	3.887.850	15,26	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran pada BBM dan mamin sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	184.853.791	172.958.417	93,56	11.895.374	6,44	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		Keterangan
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	27.023.631	23.056.247	85,32	3.967.384	14,68	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran terbesar pada pemeliharaan repiter dan mamin sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	41.014.960	39.880.000	97,23	1.134.960	2,77	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran terbesar pada honor narasumber karena sesuai dengan aturan jika narasumber dari dalam OPD sendiri diberikan 50% dan mamin sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	82.000.000	79.526.170	96,98	2.473.830	3,02	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran terbesar pada honor narasumber karena sesuai dengan aturan jika narasumber dari dalam OPD sendiri diberikan 50% dan mamin sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023
Penyusunan Rencana Kontijensi	24.925.200	21.773.000	87,35	3.152.200	12,65	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran pada BBM dan SPPD sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		Keterangan
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	9.890.000	8.723.000	88,20	1.167.000	11,80	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran pada mamin sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	112.177.709	105.699.008	94,22	6.478.701	5,78	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	38.377.841	34.772.104	90,60	3.605.737	9,40	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran pada mamin sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	68.800.000	68.067.904	98,94	732.096	1,06	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran pada SPPD sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	4.999.868	2.859.000	57,18	2.140.868	42,82	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran pada mamin, sub kegiatan ini untuk mendukung percepatan penanganan covid 19 dan setelah ada kepres no 17 tentang penetapan berakhirnya covid 19 kegiatan tidak dilaksanakan lagi sehingga tidak ada realisasi anggaran
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	46.991.300	45.152.900	96,09	1.838.400	3,91	
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	14.414.300	12.576.000	87,25	1.838.300	12,75	tidak ada kendala realisasi sesuai dengan kebutuhan, sisa anggaran pada mamin sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan SE Bupati nomor 900/1683/406.028/2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		Keterangan
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	32.577.000	32.576.900	100,00	100	0,00	tidak ada permasalahan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek adalah sebesar 97,64% telah mendukung perencanaan kinerja selama tahun 2023, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotaa dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 3.930.523.546 (98,02%).
2. Program Penanggulangan Bencana menyerap anggaran sebesar Rp. 345.396.675 (93,48%).

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek. Sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan untuk mewujudkan Trenggalek sebagai *good governance*.

Dalam rangka melaksanakan sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya kewaspadaan terhadap bencana, untuk tahun 2023 BPBD didukung dana APBD kabupaten sebesar Rp. 4.379.292.193,00 yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.930.523.546,00 dan Program Penanggulangan Bencana dengan realisasi serapan sebesar Rp. 345.396.675,00.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek selama tahun anggaran 2023 terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Belum terpenuhinya/ tersediannya peralatan dan sarpras penanggulangan bencana yang sesuai dengan standart/ketentuan BNPB;
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam menganalisa kebutuhan logistik terutama ketika terjadi bencana;
3. Lemahnya koordinasi antar stakeholders dalam penanggulangan bencana ;
4. Terlalu luasnya cakupan wilayah yang memiliki multi resiko bencana;
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas keberadaan BPBD dalam perannya sebagai kordinator penanggulangan bencana.

Upaya peningkatan dan perbaikan kinerja terus dilakukan dengan cara meningkatkan kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas yang diemban dalam bentuk:

6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait maupun BPBD Provinsi dan BNPB dalam dukungan sarpras dan logistik bencana;
7. Mengoptimalkan koordinasi dengan dinas terkait dalam menganalisa kebutuhan logistik;
8. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders terkait pemanggulangan bencana dengan membangun kerangka regulasi yang jelas ;
9. Memaksimalkan peran TRC dan Pusdalops PB serta menngkatkan kapasitas sumber daya aparatur PB dengan mengikuti bimtek dan duklat kebencanaan;
10. Memberikan sosialisasai, informasi dan edukasi kepada masyarakat agar sadar akan bencana.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 ini disusundengan harapan dapat bermanfaat bagi kepentingan yang lebih besar dan semogamenjadi bahan pertimbangan evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Namun demikian dalam Penyusunan LKJiP ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa yang akan datang, oleh karena itu masukan-masukan yang positif, kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan Penyusunan LKJiP dapat tercapai lebih baik lagi.

Trenggalek, Februari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si

Pejabat Utama Muda

NIP. 197009071990031002

LAMPIRAN :

- 1. PERJANJIAN KINERJA 2023**
- 2. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Kameng Jimat 191 A Telp/WA : 0822 4474 9996

TRENGGALEK

Email: bpbd.trenggalek@gmail.com Web: Http://bpbd.trenggalek.kab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si**
 Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
 Jabatan : Bupati Trenggalek.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja rangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 31 Maret 2023

BPBD TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700907 199003 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	SASARAN KNERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai SAKIP	80,75 (A)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86
2	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pra, saat dan pasca bencana	Persentase desa tangguh bencana	31,85%
		Persentase kejadian bencana yang tertangani	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.763.565.977,00	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp 350.000.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 4.113.565.977,00	

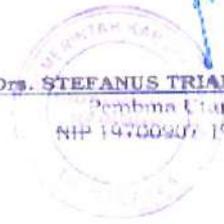
BUPATI TRENGGALEK
 selaku
 Pihak Kedua.



MOCHAMAD NUR ARIFIN

Treggalek, 31 Maret 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD
 KABUPATEN TRENGGALEK
 selaku
 Pihak Pertama,

Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 19700907 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Kanjeng Jimat 191 A Telp/WA 0822 4474 9096

TRENGGALEK

Email : bpd.trenggalek2@gmail.com Web : Http:// bpd.trenggalekkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : Bupati Trenggalek

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, **27** Oktober 2023

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,


Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700907 199003 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (kategori Nilai) SAKIP	80,75 (A)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86
2	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana	31,85%
		Persentase kejadian bencana yang tertangani	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 4.009.795.193,00	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp 369.497.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 4.379.292.193,00	

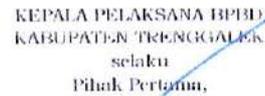
BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

Trenggalek, 27 Oktober 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,



Dr. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700907 199003 1 002

